

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Batasan kodrat manusia seperti agama, suku, ras, maupun fisik tidak menjadi dasar membatasi hak sebagai warga negara dalam mengenyam pendidikan. Hak pendidikan yang dimaksud dalam hal ini menyangkut pelayanan peningkatan mutu pendidikan di segala bidang. Setiap peserta didik berhak mendapatkan pelayanan dan kemajuan pendidikan yang signifikan terlepas dari peserta didik reguler dan peserta didik berkebutuhan khusus. Kebijakan pemerintah untuk pemerataan pendidikan diselenggarakan melalui pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif hadir sebagai terobosan baru dalam dunia pendidikan, memberikan kesempatan kepada seluruh anak untuk mendapatkan layanan pendidikan, tidak terkecuali bagi anak berkebutuhan khusus (ABK). Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif. Pelaksanaan pendidikan inklusi berlaku diseluruh pelosok negeri yang kebijakannya disesuaikan dengan wewenang pemerintah setempat.

Konsep pendidikan inklusi merupakan sistem layanan pendidikan yang mempersyaratkan agar semua ABK dilayani disekolah-sekolah terdekat dan berada di dalam kelas reguler bersama teman seusianya (Kadir, 2015). Pendidikan inklusi diselenggarakan untuk memfasilitasi pendidikan setiap individu tanpa adanya diskriminasi. Idealnya, peserta didik berkebutuhan khusus

diterima dan didukung oleh semua warga sekolah. Praktek di lapangan, terdapat beberapa sekolah yang tidak ingin menerima peserta didik dengan disabilitas karena takut akan timbul protes dari pihak orang tua murid dan driskiminasi yang diberikan oleh lingkungan di sekitar sekolah (Kawser et al., 2016). Maka diperlukan manajemen layanan inklusi yang baik dan benar di dalam pendidikan inklusi untuk mengatur mekanisme pembelajaran peserta didik berkebutuhan khusus dan peserta didik reguler. Dalam proses pengelolaan pendidikan inklusi terdapat beberapa komponen yang saling berkaitan. Salah satu komponen yang penting dalam pendidikan adalah kurikulum. Kurikulum yang ada di sekolah inklusi harus menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik atau fleksibel. Kemudian komponen yang lainnya mencakup kepeserta didikan, kurikulum, tenaga kependidikan terlatih, sarana dan prasarana yang menunjang, pembiayaan, dan masyarakat atau lingkungan sekitar.

Kenyataannya sekolah inklusi belum memberikan layanan yang optimal kepada peserta didik berkebutuhan khusus. Ada berbagai tantangan dan hambatan yang harus dihadapi baik di dalam maupun di luar sekolah, termasuk kurangnya pengetahuan guru tentang bagaimana membantu peserta didik dengan berkebutuhan khusus pembelajaran. Hal ini dibuktikan dengan adanya data tahun 2021 menunjukkan bahwa jumlah anak berkebutuhan khusus (ABK) di Indonesia mencapai 1.544.184 anak, dengan 330.764 anak (atau 21,42% dari total) berada dalam rentang usia 5–18 tahun. Ini menunjukkan bahwa ada populasi yang signifikan dari anak berkebutuhan khusus di Indonesia. Namun, hanya sekitar 12,26% dari anak penyandang disabilitas yang menerima

pendidikan formal melalui jalur sekolah inklusi dan Sekolah Luar Biasa (SLB). Meskipun jumlah mereka terus meningkat setiap tahun, masih ada masalah dalam pendidikan inklusi, seperti kurangnya keterampilan dan pemahaman tenaga pendidik tentang cara menangani ABK. Hal ini sejalan dengan penelitian (Juwono & Kumara, 2011) kurangnya pengetahuan guru tentang ABK, minimnya keterampilan guru dalam menangani ABK, belum memiliki guru pendamping khusus, dan sikap guru yang masih memandang rendah ABK. Mengakibatkan keberadaan baik guru maupun guru pendamping khusus (*shadow teacher*) dinilai belum proaktif dan sensitive terhadap permasalahan yang dihadapi peserta didik berkebutuhan khusus. Dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi tidak hanya guru saja yang dibutuhkan, ada sarana dan prasarana yang menunjang. Kenyataannya, sarana dan prasarana masih terbatas, sedangkan dalam penyelenggaraannya dibutuhkan sarana dan prasarana yang menunjang. Hal ini sejalan dengan penelitian Pratiwi, (2015) sekolah harus menyesuaikan sarana dan prasana dengan berbagai jenis kebutuhan khusus yang berbeda-beda seperti tunadaksa, tunarungu, *slow learner*, dan sebagainya sesuai kondisi peserta didik berkebutuhan khusus. Dengan demikian, fakta dan keterbatasan tersebut mempengaruhi kurangnya sekolah dalam pelayanan terhadap peserta didik berkebutuhan khusus. Penyelenggaraan sekolah inklusi memang tidak semudah dengan menyelenggarakan sekolah umum.

Sekolah inklusi merupakan sekolah yang menerima peserta didik berkebutuhan khusus dan peserta didik reguler dengan tujuan untuk memperoleh pendidikan yang sama. Dalam sekolah inklusi peserta didik berkebutuhan

khusus tidak mendapatkan hak istimewa, melainkan persamaan hak dan kewajiban seperti peserta didik reguler. Hal ini sejalan dengan pendapat UNESCO (1994) pada prinsip pendidikan untuk semua (*education for all*) artinya pendidikan tersedia untuk semua peserta didik reguler maupun peserta didik berkebutuhan khusus. Tujuannya untuk menghindari anak putus sekolah, sebab bagaimanapun mereka perlu diberikan pembekalan ilmu pengetahuan dan aspek kemandirian sebagai modal dasar memenuhi kehidupan yang layak. Sekolah inklusi dilaksanakan sebagaimana sekolah umum, tetapi perbedaannya pada penerimaan berkebutuhan khusus sebagai peserta didik dengan memberikan sistem layanan pendidikan yang disesuaikan. Begitu juga dengan peserta didik reguler menyesuaikan dengan kurikulum, strategi atau metode pembelajaran, penilaian, dan sarana prasarana (Kadir, 2015). Peserta didik berkebutuhan khusus mendapatkan pelayanan sesuai dengan potensinya dan peserta didik reguler mendapatkan layanan untuk mengembangkan potensi sesuai dengan yang dimiliki. Sehingga mereka secara bersama-sama dapat mengembangkan potensinya sesuai dengan yang dimiliki.

Salah satu penunjang keberhasilan pendidikan adalah pelayanan. Sekolah inklusi, sebagai penyedia layanan pendidikan untuk peserta didik berkebutuhan khusus, seharusnya memberikan pelayanan prima kepada tenaga pendidik, peserta didik, dan wali murid, termasuk penyediaan tenaga pendidik, penerimaan peserta didik baru, pelayanan bagi peserta didik dalam bidang akademik maupun non akademik, dan informasi tentang perkembangan peserta didik (Siregar, 2021). Pemahaman dasar yang perlu diketahui pada sekolah inklusi yakni

mengenai peserta didik yang berada di sekolah tersebut. Peserta didik yang berada di sekolah inklusi ada dua jenis yaitu peserta didik reguler dan peserta didik berkebutuhan khusus atau peserta didik dengan penyandang disabilitas (*children with special needs*). Peserta didik berkebutuhan khusus adalah peserta didik yang memiliki kelainan nyata (fisik, mental, intelektual, sosial, dan emosional) dalam pertumbuhan dan perkembangannya dibandingkan dengan peserta didik reguler yang sebaya (Nurhayati, 2014). Sehingga, peserta didik berkebutuhan khusus memerlukan pelayanan khusus untuk memperoleh pendidikan. Mengidentifikasi peserta didik berkebutuhan khusus juga diperlukan agar keberadaannya dapat diketahui sedini mungkin. Anak berkebutuhan khusus sebenarnya memiliki arti dan cakupan yang luas dibandingkan dengan anak luar biasa (*exceptional children*). Dalam bidang pendidikan, ABK memerlukan pelayanan khusus karena memiliki hambatan dalam belajar dan perkembangannya (*barriers to learning and development*). Seperti tunanetra, tuli, *slow learner*, *down syndrome*, *autism*, tunawicara, tunadaksa, cacat fisik, sehingga mereka mencapai proses dalam belajarnya (emosi dan kontrol sosial) sebagaimana peserta didik reguler (Lattu, 2018).

Pemerintah Kota Bontang melalui Dinas Pendidikan Kota Bontang telah mengimplementasikan kebijakan pusat di tahun 2013 untuk menetapkan sekolah penyelenggara Pendidikan inklusif. Penetapan ini diberlakukan dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Penyelenggaraan pendidikan inklusi paling sedikit ada satu sekolah dalam satu kecamatan. Ketetapan ini dilandasi oleh Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor

70 tahun 2009 pasal 4 bahwa pemerintah kabupaten/kota menunjuk paling sedikit 1 (satu) SD, 1 (satu) Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan 1 (satu) SMA pada setiap kecamatan untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif dan wajib menerima peserta didik berkebutuhan khusus (Redaksi, 2021). Tidak hanya dari sekolah negeri saja yang mengimplementasikan pendidikan inklusi, ada juga beberapa sekolah swasta yang turut hadir dalam memenuhi kebijakan dari pusat, salah satunya Sekolah Kreatif Muhammadiyah 2 Bontang.

Sekolah Kreatif Muhammadiyah 2 Bontang sebagai pelopor sekolah dasar pertama yang menyelenggarakan pendidikan inklusi pada tahun 2010, dimana sekolah ini juga berdiri untuk pertama kalinya. Sekolah yang sering di sapa dengan julukan Sekolah Kreatif ini berbasis keagamaan dan kreatifitas (Sekolah Kreatif, 2022). Berdasarkan wawancara pra penelitian 25 September 2023 dengan Manajer menyampaikan bahwa Sekolah Kreatif Muhammadiyah 2 Bontang termasuk dalam sekolah inklusi yang menerima peserta didik berkebutuhan khusus sejak tahun 2010. Kegiatan belajar mengajar di sekolah ini sama seperti sekolah inklusi pada umumnya. Hanya saja yang membedakan terletak pada kurikulum yang digunakan yaitu menggunakan kurikulum modifikasi. Sekolah juga memberikan pelayanan dengan menyediakan guru pendamping (*shadow teacher*). Memiliki program khusus yang dilaksanakan seminggu sekali secara bersama selama 1 jam setelah jam istirahat pertama. Sedangkan terapi secara berkelompok dilakukan setiap hari dengan bergiliran, sesuai jadwal yang telah dibentuk oleh koordinator. Penanggung jawab terapi yakni seorang psikolog dan ketika peserta didik terapi akan didampingi oleh

shadow teacher. Terapi yang diberikan untuk peserta didik berkebutuhan khusus sesuai dengan ketunaan peserta didik. Dengan diberikannya terapi kepada peserta didik berkebutuhan khusus diharapkan mereka dapat mengoptimalkan kemampuannya.

Kesuksesan Sekolah Kreatif menarik banyak orang tua dan masyarakat untuk menyekolahkan anak mereka yang memiliki keistimewaan untuk dapat berbaaur dengan anak normal seusianya. Kesuksesan ini dapat dilihat dari keunggulan, implementasi, dan layanan inklusi yang diterapkan di Sekolah Kreatif Muhammadiyah 2 Bontang yaitu dengan memberikan hak pendidikan yang sama dalam hal pendidikan khusus baik peserta didik reguler maupun peserta didik berkebutuhan khusus. Tenaga kependidikan termasuk manajer dan kepala sekolah yang berada di Sekolah Kreatif, memiliki pemahaman tentang cara melayani orang tua dan peserta didik dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi. Sehingga, sekolah ini menjadi *role model* penyelenggaraan dalam manajemen layanan inklusi bagi sekolah-sekolah yang berada di Kota Bontang. Salah satu indikator yang menunjukkan bahwa Sekolah Kreatif Muhammadiyah 2 Bontang sebagai *role model* bagi sekolah lain adalah banyaknya studi tiru yang dilakukan kepala sekolah lain ke sekolah tersebut. Model penyelenggaraan pendidikan inklusi merupakan sebuah bentuk penyelenggaran pendidikan yang patut untuk dikembangkan. Terutama di wilayah Bontang karena belum ada model tersebut. Faktanya apa yang sudah dilakukan belum banyak di eksplorasi secara tertulis, sehingga model tersebut belum bisa di akses secara luas oleh sekolah lain kecuali, yang harus berkunjung. Maka diperlukan penelitian

eksploratif untuk mendapatkan gambaran nyata tentang model sekolah manajemen layanan inklusi anak berkebutuhan khusus di Sekolah Kreatif Muhammadiyah 2 Bontang.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, ditemukan beberapa permasalahan yaitu:

1. Idealnya peserta didik berkebutuhan khusus diterima dan didukung oleh semua warga sekolah. Praktek di lapangan, terdapat beberapa sekolah yang tidak ingin menerima peserta didik dengan disabilitas.
2. Dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi tidak hanya guru saja yang dibutuhkan, harus ada juga fasilitas seperti sarana dan prasana yang menunjang, namun kenyatannya fasilitas tersebut masih terbatas.
3. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan guru dalam menangani peserta didik berkebutuhan khusus menjadi hambatan serius dalam memberikan pendidikan inklusi yang efektif.
4. Sikap merendahkan dari sebagian guru terhadap peserta didik berkebutuhan khusus menciptakan lingkungan yang tidak kondusif bagi perkembangan mereka. Hal ini secara signifikan membatasi akses mereka terhadap pendidikan berkualitas dan mendukung kemajuan mereka secara keseluruhan.
5. Meskipun belum memiliki sumber daya pendidik dari latar belakang pendidikan inklusi, sekolah ini telah menjadi rujukan sekolah-sekolah lain di Kota Bontang. Oleh karena itu, bagaimana sekolah ini mengelola

manajemen layanan inklusi dengan segenap keterbatasannya menarik untuk diteliti.

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang teridentifikasi, maka masalah dalam penelitian ini dibatasi pada bagaimana sekolah tersebut mengelola manajemen layanan inklusi dengan sumber daya yang terbatas namun telah menjadi rujukan bagi sekolah-sekolah lain di Kota Bontang. Hal ini menjadi penting karena sikap guru, ketersediaan fasilitas, dan manajemen layanan inklusi yang efektif merupakan faktor kunci dalam menjamin akses dan kualitas pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus di lingkungan Sekolah Kreatif Muhammadiyah 2 Bontang.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya yaitu bagaimana manajemen layanan inklusi anak berkebutuhan khusus di Sekolah Kreatif Muhammadiyah 2 Bontang?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan proses dan mengeksplorasi tentang manajemen layanan inklusi anak berkebutuhan khusus di Sekolah Kreatif Muhammadiyah 2 Bontang.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan terutama di bidang Manajemen Pendidikan yakni manajemen layanan inklusi di sekolah. Mengembangkan potensi untuk penelitian karya ilmiah, khususnya bagi peneliti maupun kalangan akademis, dalam memberikan informasi mengenai kesempatan yang diberikan kepada semua peserta didik untuk mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhannya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Sekolah

Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan kajian tentang manajemen layanan inklusi, serta sebagai bahan referensi bagi sekolah lain mengenai manajemen layanan inklusi bagi anak berkebutuhan khusus.

b. Bagi Guru

Memberikan wawasan untuk menangani peserta didik berkebutuhan khusus pada pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik, sehingga guru maupun *shadow teacher* dapat meningkatkan kualitas peserta didik berkebutuhan khusus.

c. Bagi Peserta didik

Peserta didik berkebutuhan khusus memperoleh kesempatan dalam menyesuaikan diri, meningkatkan rasa percaya diri,

menumbuhkan sikap toleransi, dan memiliki kesiapan dalam menghadapi kehidupan di masyarakat.

d. Bagi Peneliti lain

Sebagai bahan masukan dan diskusi yang dapat memberikan informasi tambahan mengenai manajemen layanan inklusi yang berada di sekolah dasar.

e. Bagi Ilmu Pengetahuan

Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama Manajemen Layanan Inklusi Anaka Berkebutuhan Khusus.